

KLIPING BERITA

Sumber : Suara NTB

06 April 2023

PAD Tak Sebanding Dampak Kerusakan, Retribusi Galian C Di Lobar Jadi Temuan BPK

BYSUARANTB.COM 6 APRIL 2023



Banyak galian C diduga ilegal dibuka di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung. Hal ini menyebabkan PAD ke daerah menjadi minim. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Retribusi galian C di Lombok Barat (Lobar) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lantaran jumlahnya yang masuk ke Pemda sangat minim. PAD yang diterima Pemda tak sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Dari data Bapenda, pemasukannya dari retribusi Galian C hanya Rp500 ribu. Sementara banyak sekali galian C ilegal yang dibiarkan masih beroperasi di Lobar.

Kepala Bapenda Lobar H Ahmad Subandi mengatakan, retribusi galian C ini menjadi temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti oleh pihaknya. "Karena PAD nya kecil (minim), tidak mencapai target," kata Subandi, Rabu, 5 April 2023.

Pihaknya menyampaikan alasan ke BPK, penyebab tak maksimalnya PAD galian C akibat beberapa faktor. Pertama, koordinasi Pemda dalam hal ini OPD dengan provinsi masih lemah. Pemprov sendiri selaku pihak yang mengeluarkan izin.

Bahkan selama periode beberapa tahun, tidak ada pembahasan galian C, sehingga itu diminta agar Pemda dilibatkan ke depan. Diakui, kebijakan soal izin galian C ini beberapa kali perubahan. Awalnya menjadi kewenangan kabupaten melalui Dinas Pertambangan, lalu ditarik ke provinsi. Setelah itu ditarik oleh pusat. Kemudian ditarik lagi ke pusat pada tahun 2022. Hal ini diakuinya menjadi salah satu kendala, sehingga PAD nya tidak optimal ditarik.

Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan PAD dari retribusi galian C ini, Pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak provinsi untuk minta data. Itu menjadi dasar pengecekan ke lapangan, mana galian C yang belum dan sudah berizin. Yang belum berizin itu nanti dilakukan langkah tindak lanjut berupa penagihan. Untuk mendeteksi perizinan galian C ini, pihaknya akan menyisir mulai dari melalui proses di tata ruang pada Dinas PU dan pembahasan UKL UPL di Dinas LH. "Setelah itu baru ke provinsi untuk penerbitan izin," ujarnya.

Selama ini, setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB mengeluarkan izin pihak Pemkab Lobar tidak tahu mana izin yang diterbitkan, karena tidak ditembuskan. "Itu kita mau cari, ujarnya.

Terkait galian C yang banyak ilegal, menurut dia itu tugas Satpol PP selaku pengaman Perda. Kalau pun ditertibkan, tentu harus ditangani untuk memaksimalkan pendapatan dari galian C. "Karena di sana ada peluangnya," imbuhnya. **(her)**